



Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SURAT TUGAS

Nomor : 031B/UKI.F7.D/PP.1.6.4/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menugaskan yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fransiskus X.Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Ilmu Politik Fisipol

Sebagai Pencatatan Ciptaan dengan Jenis Ciptaan Karya Ilmiah dengan judul Politik Identitas pada putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya.

Jakarta, 3 Februari 2021

Dekan,

Angel Damayanti, M.Si., M.Sc., Ph.D

Tembusan:

1. Wakil Dekan Fisipol UKI
2. Kaprodi IPOL Fisipol UKI



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202126057, 4 Juni 2021

Pencipta

Nama : **Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali**
Alamat : Jalan Surilang RT 005 RW 012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta, DKI JAKARTA, 13760
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali**
Alamat : Jalan Surilang RT 005 RW 012 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta, DKI JAKARTA, 13760
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Politik Identitas Pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 31 Desember 2020, di Ponorogo
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000252481

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

POLITIK IDENTITAS PADA PUTARAN KEDUA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

Abstract

Political practice in a democratic country is a combination of various efforts to fulfill interests or needs from each elements and individual. These interests or needs are ultimately integrated into social groups. The Majority of Identity becoming a manifestation for fulfill political interest in a society through efforts to equalize interests in order to get support from various majority identities. Politics becomes the arena of identity struggle, than cannot be denied in any democratic country. The easiest way to see it is in the holding of elections, including the second round of Provincial Election in DKI Jakarta. This research was conducted with a qualitative approach through data collection techniques of literature study and interview studies to describe identity politics in the second round of the DKI Jakarta Provincial Election in 2017. As The result, identity. Resistant identity is the identity of rational and emotional voter behavior, the Pancasila and Anti Pancasila people and the common fate of social problems. Furthermore, the Project Identity is in the form of the nickname of sarcasm towards supporters of certain candidates who turn into supporting identities, and the replacement of certain word

Keywords : Politics of Identity, Democracy, Second Round of Pemilukada DKI Jakarta 2017

Abstrak

Praktik politik dalam sebuah negara demokrasi adalah upaya perwujudan kepentingan atau kebutuhan politik dari setiap elemen dan individu. Kepentingan atau kebutuhan politik ini pada akhirnya terintegrasi dalam kelompok-kelompok sosial. Upaya perwujudan kepentingan politik selalu dimanifestasikan dalam kelompok identitas mayoritas yang ada di dalam masyarakat melalui upaya penyamaan kepentingan agar mendapatkan dukungan dari berbagai identitas mayoritas tersebut guna memperbesar peluang yang ada. Politik menjadi ajang *identity struggle* yang tidak bisa dipungkiri dalam negara demokrasi manapun. Salah satu cara untuk mengkaji upaya perwujudan kepentingan politik berbasis identitas adalah dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data studi kajian pustaka dan interview untuk mendeskripsikan politik identitas pada putaran kedua pemilihan umum kepala daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Hasilnya bahwa pada pemilihan umum kepala daerah putaran kedua di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 terbentuk polarisasi identitas yang disebut sebagai identitas Legitimasi berupa identitas agama, etnis dan ekonomi. Identitas Resisten berupa Identitas perilaku pemilih rasional dan emosional, masyarakat Pancasila dan Anti Pancasila dan kesamaan nasib akan masalah sosial. Selanjutnya Identitas Proyek berupa julukan sarkasme terhadap pendukung kandidat tertentu yang berubah menjadi identitas pendukung, dan penggantian kata tertentu.

Kata Kunci : Politik Identitas, Demokrasi, Pemilukada, DKI Jakarta 2017

Pendahuluan

Identitas merupakan ciri manusiawi yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Identitas yang paling mendasar hingga tidak bisa ditolak atau diganti adalah ciri fisik akibat pengaruh ras dan faktor biologis (jenis kelamin), dan suku. Sementara identitas lain yang didapat oleh setiap individu karena keyakinan berupa agama, dan identitas yang didapat akibat interaksi sosial yaitu berupa identitas kelompok sosial, baik berdasarkan geografis atau wilayah tempat tinggal maupun keanggotaan dalam sebuah organisasi termasuk pekerjaan. Identitas menggambarkan tentang individu pemilik identitas, hingga karakteristik kepribadian. Karena latar pembentuk

identitas mengandung nilai-nilai sosial pembentuk kepribadian. Sehingga identitas menjadi ciri utama pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Identitas secara umum dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan). Posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya menjadi bagian dari identitas sosial, sedangkan suatu rasa kepemilikan menjado prasyarat terbentuknya identitas politik dan sekaligus menjadi pembeda yang menandai posisi subjek lainnya (Setyaningrum, 2005).

Perbedaan identitas menjadi sebuah hal yang lumrah dalam negara demokrasi dan tidak dapat dipungkiri. Castells menyebutkan bahwa identitas merupakan proses dialog internal yang mengkonstruksi individu sehingga tercipta arti dan tujuan hidup yang terbentuk dari budaya dan psikokultural (Castells, 2010). Sehingga identitas dapat menjadi alasan untuk menemukan persamaan maupun perbedaan kepentingan dan kebutuhan dengan orang lain. Sementara politik dikatakan sebagai pertarungan kepentingan, dan pada akhirnya identitas berubah menjadi komoditas politik dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan politik tersebut. Hal ini disebut sebagai politik identitas. Oleh karena itu politik identitas dapat diartikan sebagai praktek politik yang berbasis pada penggunaan identitas dalam rangka mewujudkan kepentingan politik individu maupun kelompok. Politik identitas dipahami juga sebagai sebuah upaya memperjuangkan kepentingan politik kelompok identitas tertentu akibat oleh adanya ketidakadilan yang dialami (Buchari, 2014). Sehingga faktor ketidakadilan yang dirasakan menjadi landasan dalam upaya perwujudan kepentingan atau kebutuhan politik sebuah kelompok identitas.

Pertarungan kepentingan identitas semakin mendapatkan tempatnya dalam negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Karena demokrasi didasarkan pada nilai-nilai kebebasan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini bermakna adanya kebebasan upaya perwujudan kepentingan politik dan kesamaan perlakuan di hadapan politik. Maka asas pluralisme dijadikan sebagai salah satu prinsip yang diwajibkan dalam demokrasi. Penghargaan pada kondisi plural berdampak pada beragamnya kepentingan politik yang didasarkan pada masalah sosial yang dialami, suku, agama, ras, gender, ekonomi, maupun struktur sosial lainnya yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kelompok sosial berdasarkan identitas atau kepentingan politik identitas tersebut dijadikan sebagai tujuan sebuah kelompok sosial. Sehingga Robert A. Dahl menyebut demokrasi membutuhkan hadirnya organisasi atau kelompok sosial yang bebas dan otonom namun harus diawasi, sehingga dinamakan demokrasi pluralis (A. Dahl, 1982) agar terhindar dari konflik politik. Karena pluralisme sendiri akan menjadi dilema bagi demokrasi jika masyarakat sebuah negara demokrasi tidak memahami prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Di Indonesia politik identitas dalam berbagai studi dipandang sebagai sebuah praktek politik yang buruk, karena adanya upaya menerima dan menolak orang atau kelompok sosial tertentu berdasarkan identitas. Hal ini tercermin dari ketidakinginan masyarakat untuk memilih pemimpin atau berintegrasi dengan kelompok lain yang berbeda identitas, atau konflik sosial politik lainnya yang didasarkan pada perbedaan identitas. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menunjukkan bahwa politik itu hakikatnya adalah sebuah pertarungan identitas dalam upaya mewujudkan kepentingan politik. Sehingga harapannya pembaca mampu menerima identitas sebagai sebuah kenyataan politik di negara demokrasi seperti Indonesia, dan mampu membedakan kondisi praktek politik identitas seperti apa yang dianggap buruk, dalam artian mampu memicu konflik sosial. Seperti menerima atau menolak orang lain karena berbeda identitas yang oleh Jack Snyder disebut sebagai Nasionalisme SARA (Etnic Nationalism) (Snyder, 2003). Namun pada kenyataannya politik di Indonesia selalu didasari pada identitas, atau identitas menjadi modal dalam berpolitik.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan jenis penelitian studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian (Pujosuwarno, 1992). Secara lebih mendalam studi kasus merupakan suatu model yang komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bebas waktu (Herdiansyah, 2010). Menurut

Data yang menjadi objek analisis untuk mengambil kesimpulan terhadap praktek politik identitas selama putaran kedua pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah data sekunder. Data sekunder adalah yang telah disediakan oleh orang lain berupa database, sensus, media massa, dokumen rekaman atau tertulis, dalam bentuk surat, diari, dan biografi. Penyedia data sekunder adalah media massa, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dan Tim Sukses kandidat putaran kedua pemilukada DKI Jakarta. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah menginterpretasikan makna dan realitas dari data sekunder yang telah tersedia. Menurut Fielding dan Gilbert analisis sekunder adalah bentuk riset yang makin populer setelah kini tersedia makin banyak data yang berkualitas tinggi yang mencakup banyak topik (Harrison, 2009). Oleh karena Lisa Harrison mengkategorikan praktek menganalisis data yang tersedia oleh lembaga resmi dapat dikategorikan sebagai analisis primer (Harrison, 2009) Namun data yang diberitakan oleh media massa tidak bisa dikategorikan ke dalam analisis primer, karena berita di media massa merupakan hasil interpretasi dan telah melalui proses editing, oleh karena itu dalam penelitian ini data yang diberitakan oleh media massa peneliti hanya akan mengambil informasi tentang nama organisasi relawan pendukung kandidat pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan tentang praktek politik identitas di DKI Jakarta sebagai kenyataan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang tidak dapat terelakkan.

Oleh karena itu data yang akan dikumpulkan adalah data tentang isu politik yang dijadikan sebagai visi, misi, program kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat yang menghasilkan pembentukan dukungan oleh pemilih DKI Jakarta dalam bentuk organisasi pendukung, dan relawan. Kesemua itu dibatasi pada variabel di bawah ini :

Tabel 1 Pedoman Studi Dokumentasi Politik identitas Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran ke II

Indikator/Deskripsi	Dimensi	Indikator
Identitas Legitimasi (<i>Legitimizing Identity</i>) merupakan identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal tersebut (Castells, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas agama 2. Identitas etnis 3. Identitas ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kebijakan yang ditawarkan kandidat yang berkaitan dengan identitas agama, etnis, profesi, dan status ekonomi. 2. Organisasi dan relawan pendukung yang berlatar identitas agama, etnis, profesi, dan status ekonomi 3. Populasi penduduk DKI Jakarta yang berpotensi menjadi pemilih berdasarkan identitas agama, etnis, profesi, dan status ekonomi.
Identitas Resisten (<i>Resistance Identity</i>) yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas perilaku pemilih rasional dan emosional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas yang lahir dari julukan terhadap pemilih berdasarkan perilaku pemilih selama putaran kedua pemilukada DKI Jakarta tahun 2017.

identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya (Castells, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Identitas ideologi Pancasila dan Anti Pancasila 3. Identitas kesamaan masalah sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Identitas sosial berdasarkan kesamaan masalah sosial : masyarakat korban penggusuran pemukiman, korban dan reklamasi pulau, dan korban banjir.
Identitas Proyek (<i>Project Identity</i>) yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan (Castells, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas agama: melalui pembentukan identitas sarkasme politik dalam bentuk julukan dari kata atau simbol berlatar agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaum Munafikun 2. Kaum Kafirun 3. Bani Serbet 4. Bani Taplak 5. Kata “masyarakat” diganti dengan kata “umat”.

Hasil dan Pembahasan

Politik Identitas

Identitas merupakan sebuah proses alamiah yang dijalani oleh manusia dengan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial, yang berdampak pada proses pembentukan diri manusia itu sendiri oleh karena nilai, ciri, dan karakteristik yang dimiliki. Widayanti memandang proses manusia membentuk dirinya (*selfness*) dilakukan dengan mencari negasinya atau *the other*. Cara individu dalam memandang dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan komunitas atau kelompok sosial tertentu pasti mempengaruhi proses *selfness* dan *the other* (Widayanti, 2009). Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah ciri yang sama dari sekelompok manusia yang disebut sebagai identitas. Sehingga dikatakan sebagai proses alamiah, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu materi maupun non materi.

Selanjutnya Manuel Castells menjelaskan bahwa identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (Castells, 2010). Pemahaman akan identitas dari Castells ini kemudian dapat dipakai untuk memahami mengapa di tengah masyarakat terkadang tidak mampu membedakan antara identitas dan strotipe. Karena keduanya sama-sama lahir dari interaksi sosial dan proses dialog internal yang kesimpulannya selalu lahir dari sebuah kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga kemudian ketika menjelaskan sebuah kelompok masyarakat tertentu, cenderung melekatkan strotipe sebagai sebuah identitas. Tidak jarang identitas berdasarkan strotipe itu sifatnya positif maupun negatif, misalnya, Orang Makassar jago berdagang, orang Padang dan China kikir, orang Israel jahat, orang dari Indonesia Timur kasar, dan masih banyak lainnya. Hal ini yang disebut oleh Castells sebagai identitas resisten.

Dampak dari adanya interaksi sosial juga telah melahirkan berbagai macam peran, sehingga 1 orang bisa memiliki beberapa identitas yang melekat dalam dirinya, baik itu ras, suku, agama, profesi, pendidikan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, hingga pilihan politik. Semua itu menjadi identitas yang kemudian melekat, atau dilekatkan pada setiap individu. Sehingga seorang bisa menjadi anggota dari sebuah kelompok identitas, maka politisasi identitas kemudian dianggap tidak stabil atau dapat berubah sesuai kebutuhan dan situasi.

Politisasi identitas atau politik identitas selalu dilakukan dalam bentuk penggabungan identitas baru dengan menemukan persamaan nilai baru untuk mengubah praktek sosial (Barker, 2005), atau mewujudkan kepentingan politik tertentu. Hal ini wajar saja dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi sosial. Sementara Heller memandang perbedaan menjadi dasar dari lahirnya politik identitas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakadilan yang dirasakan identitas tertentu, sehingga kelompok identitas yang

mengalaminya akan menggunakan menunjukkan perbedaan yang dimilikinya sebagai alasan untuk mendapatkan kesetaraan dan toleransi. Namun harus diakui bahwa hal tersebut akan memicu lahirnya perilaku rasisme dan kekerasan oleh karena alasan perbedaan itu sendiri (Heller, 1995).

Pandangan Heller diperkuat oleh Kristianus, yang menganggap politik identitas merupakan bentuk perjuangan kelompok pinggiran secara politik, ekonomi maupun sosial budaya, dengan mengedepankan identitas etnis atau agama (Kristianus, 2009). Sehingga kelompok identitas yang mengalami ketidakadilan atau yang terpinggirkan dalam sebuah sistem sosial dapat memperjuangkan perwujudan kepentingan kelompoknya (Subianto, 2009). Deskripsi politik identitas ini memandang identitas dapat digunakan sebagai upaya untuk bertarung dalam memperebutkan kekuasaan politik sehingga lebih mudah mewujudkan kepentingan politik yang dimiliki. Pada prakteknya identitas dikalkulasikan sebagai modal atau komoditas dalam pemilihan umum di negara demokrasi.

Bentuk-bentuk politik identitas dapat dilihat dalam bentuk artikulasi dan agregasi kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik, penguasaan atas distribusi nilai, tuntutan untuk mengurus diri sendiri (daerah otonom, pemekaran daerah, dan keinginan merdeka), pembuatan kebijakan berdasarkan nilai-nilai identitas, hingga perebutan kekuasaan dimana terjadi penolakan terhadap pemimpin yang berbeda identitas. Castells mengklasifikasikan identitas ke dalam tiga bentuk antara lain; Identitas Legitimasi (*Legitimizing Identity*), yang dipandang sebagai identitas yang dibentuk oleh institusi atau kelompok dominan untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya. Hal itu dipandang sebagai upaya sah dilakukan karena memiliki legitimasi untuk melakukan hal tersebut. Kedua, Identitas Resisten (*Resistance Identity*) merupakan identitas yang lahir dari resistensi aktor sosial sebagai bentuk perlawanan atas dominasi oleh identitas dominan atau stereotip sosial. Ketiga, Identitas Proyek (*Project Identity*) merupakan identitas baru yang dibentuk untuk menentukan posisi baru sehingga mampu mentransformasikan struktur sosial, nilai, cara pandang, hingga perilaku sosial (Castells, 2010).

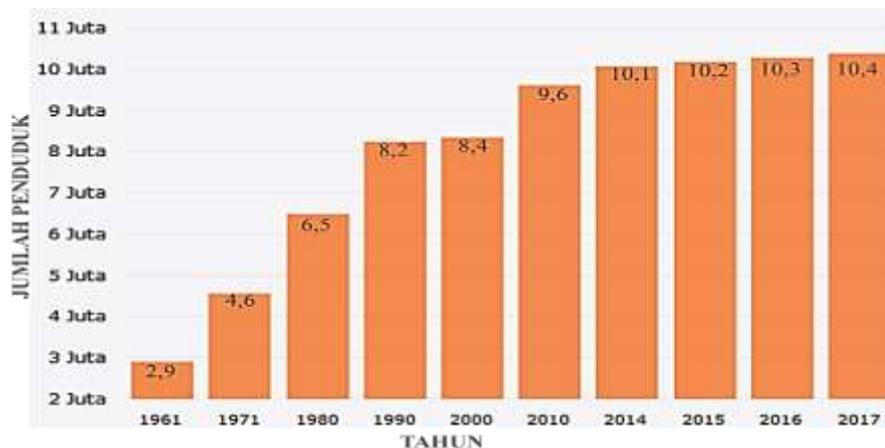
Sementara untuk mengidentifikasi pelaku politik identitas, Sofyan Sjaf menggunakan lima tipologi sebagai berikut ; pertama, *Tipologi Aktor-Individu*, bahwa setiap individu memiliki banyak peran dalam lingkungan sosial, sehingga identitas yang dimiliki akan dikonstruksikan sesuai dengan peran yang sedang dijalani oleh individu tersebut. Kedua, *Tipologi Aktor-Kelompok*, bahwa meskipun individu mampu mengkonstruksikan identitasnya sesuai peran yang dijalani, namun identitas yang dimiliki individu tersebut juga dipengaruhi oleh kelompok sosial dimana individu tersebut berperan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas individu maupun kelompok saling mempengaruhi secara timbal balik dalam proses politik identitas, baik itu identitas etnis, agama atau gender. Ketiga, *Tipologi Aktor-Struktur-Komunikatif*, memandang struktur sosial dan proses komunikasi akan membentuk kesepakatan antar individu maupun kelompok tentang suatu identitas bersama. Hal ini bisa saja didasarkan pada kesamaan identitas, atau kesamaan kepentingan politik yang melahirkan identitas baru yang terdiri dari berbagai kepentingan identitas individu maupun kelompok. Keempat, *Tipologi Struktur-Individu*, memandang adanya hegemoni atau dominasi struktur sosial, dipandang sebagai pengaruh eksternal, yang akan membentuk ciri atau karakter identitas individu atau aktor politik. Kelima, *Tipologi Struktur-Kelompok*, tipologi terakhir ini memandang pertentangan dalam realitas sosial sebagai konstruksi sejarah akan melahirkan kelompok identitas yang berbeda atau berlainan kutub (Sjaf, 2014)

Komposisi Identitas Provinsi DKI Jakarta

Sebagai sebuah daerah yang juga adalah ibukota negara, maka Provinsi DKI Jakarta memiliki komposisi penduduk yang sering dikatakan sebagai miniatur Indonesia karena hampir semua penduduk Indonesia dengan berbagai latar identitas ada di wilayah ini. Hal ini terwujud

secara alamiah, karena sebagai sebuah ibukota negara, dalam prakteknya selama berpuluh tahun lamanya hingga saat ini, DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, hingga menjadi penentu terjadinya perubahan sosial.

Sejarah panjang sebelum era kolonialisme, kolonial, hingga kemerdekaan pun memberikan kontribusi bagi kondisi plural bagi di DKI Jakarta. Seiring dengan itu pula jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1870, jumlah penduduk Jakarta atau yang saat itu disebut sebagai Batavia sekitar 65.000 jiwa, dan awal abad ke-20 (1901) jumlah penduduk sebanyak 115.900 jiwa. Jumlah penduduk pun kian bertambah dari tahun ke tahun, terutama setelah Kemerdekaan, mencapai 600.000 jiwa. Setelah dinyatakan sebagai ibu kota negara RI, tepatnya tahun 1950, jumlah penduduk DKI Jakarta naik tiga kali lipat, menjadi 1.733.600 jiwa (Rahmatulloh, 2017 : 59).



Gambar 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Sejak Tahun 1961-2017

Sumber data: (Katadata.co.id, 2018)

Data ini menunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta per tahun adalah 1,07 % (BPS DKI Jakarta, 2017).

Tabel 2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Kota	Laki-laki	Perempuan
Kep.Seribu	13.902 jiwa	13.689 jiwa
Jakarta Pusat	577.169 jiwa	561.347 jiwa
Jakarta Utara	867.772 jiwa	847.809 jiwa
Jakarta Barat	1.179.506 jiwa	1.147.215 jiwa
Jakarta Selatan	1.102.422 jiwa	1.086.593 jiwa
Jakarta Timur	1.489.527 jiwa	1.457.067 jiwa
Total	5.230.298 jiwa (50,56%)	5.113.720 jiwa (49,44%)
Penduduk DKI Jakarta tahun 2017 10.344.018		

Sumber Data : (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2017)

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan hampir berimbang di DKI Jakarta, sehingga tidak heran jika gender dapat menjadi komoditas politik dalam Pemiluakada DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari data pemilih tetap pemiluakada Provinsi DKI Jakarta berdasarkan gender pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Data Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Nama Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Kep.Seribu	8.786	8.629	17.415
Jakarta Pusat	374.307	372.845	747.152
Jakarta Utara	547.668	544.206	1.091.874
Jakarta Barat	834.448	817.603	1.652.051
Jakarta Selatan	796.540	797.160	1.593.700
Jakarta Timur	999.941	1.006.456	2.006.397
Total DPT DKI Jakarta	3.561.690 (50,10%)	3.546.899 (49,90%)	7.108.589 (100%)

Sumber Data : (Komisi Pemilihan Umum, 2020)

Etnis

Penduduk DKI Jakarta dihitung berdasarkan etnis pada tahun 2000, didominasi oleh etnis Jawa (35,16%) lebih banyak dari etnis Betawi (27,65%) dan Sunda (15,27%) (Leo Suryadinata, 2003:13). Suku Jawa menjadi sangat dominan hampir di seluruh pelosok Indonesia (Hasil sensus penduduk tahun 2010 sejumlah 94.843 atau sekitar 40.06 %. Dominasi etnis Jawa dan Sunda dalam komposisi penduduk DKI Jakarta telah terjadi sejak masa lalu, meskipun klaim etnis Betawi sebagai etnis asli DKI Jakarta, namun komposisinya tidak lebih banyak dari kedua etnis tersebut yang dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 1961 pada tabel 4 (Castell, 2007)

Tabel 4. Komposisi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Etnisitas 1961

Kelompok Etnis	Jumlah	%
Betawi	655.400	22,9
Sunda	352.500	32,8
Jawa dan Madura	737.700	25,4
Minangkabau	60.100	2,1
Sumatera Selatan	34.900	1,2
Batak	28.900	1,0
Sulawesi Utara	21.000	0,7
Maluku dan Papua	11.800	0,4
Aceh	5.200	0,2
Banjar	4.800	0,2
Nusa Tenggara Timur	4.800	0,2
Bali	1.900	0,1
Cina	294.000	10,3
Tidak diketahui	38.600	1,3
Lain-lain (non Pribumi)	16.500	0,6
Total	2.906.500	100

Sumber data : (Castell, 2007)

Berdasarkan tabel diatas jika kita menganggap orang Betawi sebagai penduduk asli DKI Jakarta, maka terdapat 77.1 % penduduk DKI Jakarta pada 1961 adalah masyarakat pendatang. Hal ini menurut Candiwidoro disebabkan oleh proses identifikasi diri oleh keturunan pendatang di DKI Jakarta sebagai orang Betawi, dan tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan etnis asal orangtua (Candiwidoro, Januari 2017).

Kondisi tersebut dapat dilihat pula dari hasil sensus penduduk tahun 2010 yang menampilkan adanya peningkatan jumlah etnis Betawi, maupun etnis lainnya di DKI Jakarta pada tabel 5 di bawah ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa penambahan jumlah etnis paling banyak ditentukan oleh proses kelahiran. Untuk kasus Provinsi DKI Jakarta faktor

urbanisasi turut menentukan penambahan jumlah orang pada etnis tertentu, termasuk etnis Betawi dengan proses yang disebutkan Candiwidoro diatas.

Tabel 5 Data Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Etnis Pada Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Daftar Etnis	Jumlah ±
1	Jawa	3.453.453 orang
2	Betawi	2.700.722 orang
3	Sunda	1.395.025 orang
4	Tionghoa	632.372 orang
5	Batak	326.645 orang
6	Minangkabau	272.018 orang
7	Lainnya	750.142 orang

Sumber Data : (Pinter Politik, 2017)

Dengan demikian pada tahun 2010, sekitar 36,64 % penduduk DKI Jakarta merupakan Suku Jawa, berikutnya 28,65 % Suku Betawi; 14,80 % Suku Sunda; dan 19,92 % suku-suku lainnya.

Agama

Jika jumlah penduduk DKI Jakarta diklasifikasikan berdasarkan agama maka klasifikasinya berdasarkan tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Penduduk Jakarta Berdasarkan Agama Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

No	Daftar Agama	Jumlah
1	Islam	8,200,796 orang
2	Kristen	724,232 orang
3	Katolik	303,295 orang
4	Hindu	20,364 orang
5	Budha	317,527 orang
6	Konghucu	5,334 orang
Total Yang Terdata		9,607,787 orang

Sumber Data : (BPS Sensus Penduduk 2010, n.d.).

Asumsi penambahan umat beragama maupun jumlah penduduk secara umum bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelahiran dan kematian, urbanisasi, imigrasi, maupun naturalisasi warga negara asing. Namun pada penghitungan BPS DKI Jakarta pada tahun 2016 terdapat beberapa fluktuasi jumlah umat beragama di Jakarta dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Data Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama Pada Tahun 2016

No	Daftar Agama	Jumlah
1	Islam	8.589.252 orang
2	Kristen	887.628 orang
3	Katolik	411.430 orang
4	Hindu	19.411 orang
5	Budha	385.932 orang
6	Konghucu	1.166 orang
7	Aliran Kepercayaan Lain	189 orang
Total Yang Terdata		10.275.597 orang

Sumber Data : (BPS DKI Jakarta Dalam Angka 2017, 2017)

Perbandingan data penduduk berdasarkan agama pada tahun 2010 dan tahun 2016 menunjukkan peningkatan umat Islam sejumlah 388.456 orang, umat Kristen sejumlah

163.396 orang, umat Katolik sebesar 108.135 orang, umat Hindu terjadi penurunan sebesar 953 orang, umat Budha terjadi peningkatan sejumlah 68.405 orang, umat Konghucu terjadi penurunan sejumlah 4.168 orang. Sementara umat kepercayaan lain baru dihitung pada tahun 2016 pasca gugatan mereka ke MK terkait pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan lokal dikabulkan.

Komposisi Tenaga Kerja dan Tingkat Kesejahteraan di DKI Jakarta

Komposisi tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan turut menjadi bagian dari kondisi identitas di sebuah wilayah, jika dilihat berdasarkan besarnya pengaruh terhadap sistem politik dan sistem ekonomi. Pembagian kerja berdampak pada pembentukan identitas profesi yang berbeda diantara masyarakat, dan pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang berbeda pula. Sehingga polarisasi identitas sosial berdasarkan status ekonomi tidak dapat terhindarkan dalam kondisi masyarakat plural seperti di Indonesia. Sehingga tidak heran jika dalam pemilu maupun pemilukada selalu memasukkan unsur pengaruh dari tenaga kerja seperti penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan atau upah sebagai bagian dari visi misi maupun program kerja yang ditawarkan oleh para kandidat kepala daerah. Meski yang terutama adalah hal tersebut sebagai upaya perwujudan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Namun politisasi identitas berdasarkan status ekonomi dan profesi tenaga kerja tidak dapat terhindarkan sebagai bagian dari komoditas politik para kandidat untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu. Faktor pendorong lainnya adalah mayoritas tenaga kerja yang disebut sebagai warga negara usia produktif adalah juga warga negara yang telah memiliki hak pilih.

Tabel 8 Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Wilayah	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
Jakarta Utara	812.614 orang	62.239	441.635
Jakarta Barat	1.183.961 orang	79.678	601.366
Jakarta Pusat	427.351 orang	29.779	246.238
Jakarta Timur	1.239.832 orang	124.589	749.169
Jakarta Selatan	1.050.861 orang	71.356	534.204
Kepulauan Seribu	9.410 orang	549	5.756
Total	4.724.029	368.190	2.578.368

Sumber Data : (Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - Badan Pusat Statistik, 2016)

Dengan komposisi pencari kerja di tahun 2016 sebesar 30.857 orang (BPS DKI Jakarta, 2017), sementara pengangguran terbuka 368.190 orang dapat dikatakan bahwa jumlah lapangan kerja di DKI Jakarta cukup banyak atau memadai, jika dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari status DKI Jakarta sebagai pusat kehidupan sosial. Lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi – jasa, adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja di DKI Jakarta (tabel 9).

Tabel 9 Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	19.978
Pertambangan dan Penggalian	28.788
Industri Pengolahan	661.088
Listrik, Gas, dan Air	20.355
Bangunan	229.594
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	1.659.677
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	424.498
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	520.543

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	1.159.508
Total	4.724.029

Sumber Data : (BPS DKI Jakarta, 2017, p. 75)

Selama pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 ini juga berkembang isu tentang banyaknya Tenaga Kerja Asing, yang dianggap merebut lapangan pekerjaan masyarakat DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2016, jumlahnya sekitar 2.675 orang, yang didominasi pekerja berjenis kelamin Laki-laki.

Komposisi tenaga kerja di DKI Jakarta diatas berpengaruh terhadap pembentukan struktur sosial masyarakat DKI Jakarta berdasarkan tingkat kesejahteraan. Penduduk dengan kategori miskin yang diukur oleh BPS DKI Jakarta pada tahun 2016 sebanyak 384,030 ribu jiwa (BPS DKI Jakarta, 2017, p. 145). Dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran penduduk di bawah Rp 578 ribu per bulan. Pertumbuhan jumlah orang miskin di DKI Jakarta meningkat dari tahun 2015 sebesar 3,61 % dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 3,75% pada tahun 2016 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, September 2017), dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan masing-masing sebesar 0,52 % dan 0,10 %. Jumlah orang miskin di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan provinsi lain, jumlahnya masih lebih sedikit. Karena memang jumlah lapangan pekerjaan di perkotaan yang cukup banyak serta kemudahan berusaha maupun bekerja di sektor industri, dengan standar upah minimum regional yang juga lebih besar dari mayoritas daerah di Indonesia. Sementara penambahan jumlah penduduk miskin tidak semata disebabkan oleh kalah dalam bersaing di bidang ekonomi, namun juga faktor kelahiran, dan urbanisasi.

Meskipun jumlah orang miskin di DKI Jakarta lebih sedikit dibandingkan daerah lain namun kondisi ketimpangan sosial masih cukup tajam. Untuk mengukur ketimpangan sosial, BPS menggunakan rasio gini yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran suatu rumah tangga. Rasio Gini DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 0,397 sama dengan rasio gini nasional, lebih baik dari tahun 2015 yang mencapai 0,421, atau tahun 2014 yang mencapai 0,436. Jika kondisi ini diperbandingkan dengan ketimpangan di daerah lain, maka DKI Jakarta menjadi yang terbesar ketiga sejak September 2012 dan September 2015 (tirto.id, 2019) dari 34 Provinsi di Indonesia. Data ini dapat dibuktikan dengan data jumlah orang kaya dalam Laporan Kekayaan atau *Wealth Report 2017* yang dikeluarkan Knight Frank di DKI Jakarta dengan kekayaan diatas 1 Juta Dollar atau diatas Rp 14 Miliar sebanyak 29,340 orang. Data kekayaan yang dihitung oleh Knight Frank adalah kekayaan bersih berupa properti dan aset bergerak seperti kendaraan, namun rumah pribadi yang didiami tidak dihitung. Jumlah orang kaya di DKI Jakarta ini juga adalah kontribusi posisinya sebagai ibukota negara yang menjadi pusat seluruh kegiatan ekonomi. Sementara data tentang penduduk kaya, dapat dilihat dari Laporan Kekayaan atau *Wealth Report 2017* yang dikeluarkan Knight Frank, pada tabel di bawah ini (kompas.com, 2017):

Politik Identitas Pada Putaran Kedua Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 merupakan bagian dari pemilu serentak yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 bersama 101 daerah lainnya (provinsi, kabupaten/kota), dengan 3 pasangan kandidat yang bertarung memperebutkan posisi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga pasangan kandidat tersebut dan jumlah suara yang diraih sebagai berikut ; Agus H. Yudhoyono dan Sylviana Murni didukung PPP, PAN, Demokrat dan PKB sehingga total memiliki 28 kursi di DPRD, dan meraih 937.955 suara (17.07 %). Sementara Pasangan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat didukung Nasdem, Golkar, PDIP dan Hanura sehingga total memiliki 52 kursi di DPRD, dan meraih 2.364.577 suara (42,99 %). Terakhir pasangan Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno mendapatkan

dukungan dari Gerindra dan PKS dengan total 26 kursi di DPRD, dan meraih 2.197.333 suara (39,95 %).

Berdasarkan PKPU RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat, maka calon kepala daerah Provinsi DKI Jakarta harus memperoleh suara lebih dari 50 % untuk menjadi pemenang. Jika tidak yang mampu meraih suara diatas 50%, maka akan diadakan putaran kedua. Sehingga jika berkaca pada hasil putaran pertama maka peserta pada putaran kedua pemilukada DKI Jakarta adalah pasangan kandidat Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat dan pasangan Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno.

Pemilukada putaran kedua ini berdasarkan penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 (kpujakarta.go.id, 2017) dengan kemenangan pasangan Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno yang meraih 3.240.332 suara (57,95%). Sementara pasangan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat hanya meraih 2.351.245 suara (42,05 %). Jika dilihat dari hasil pemilu putaran kedua tersebut adanya penurunan suara pada pasangan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat sebesar 6.540 suara (0.11%) dibandingkan putaran 1, sedangkan Anies – Sandi mengalami peningkatan suara sebesar 1.046. 802 suara (18,72%). Padahal jumlah pemilih 5.591.577, artinya pemilih bertambah 103.801 suara (kpujakarta.go.id, 2017).

Politik Identitas Agama

Sebagai negara yang menempatkan syarat keyakinan beragama dalam Ideologinya, dan hanya 6 agama yang diakui, maka tidaklah heran jika agama menjadi komoditas politik yang sangat penting bagi para politisi untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih yang juga adalah umat beragama. Oleh karena itu politik identitas agama diwujudkan menjadi Identitas Legitimasi (*Legitimizing Identity*). Identitas legitimasi berdasarkan agama dipakai untuk mengidentifikasi diri kandidat dengan pemilih beragama tertentu, maupun sebaliknya. Kesamaan identitas legitimasi agama ini memiliki kecenderungan yang kuat bagi tingkat keterpilihan kandidat pada masyarakat religius seperti di Indonesia. Oleh karena itu determinasi dari identitas agama para kandidat memiliki pengaruh terhadap tingkat keterpilihan tersebut. Praktek yang dilakukan adalah dengan menawarkan kebijakan di bidang agama, atau perilaku politik yang menunjukkan keberpihakan atau kedekatan dengan umat agama tertentu, atau pemuka agama sebagai *opinion leader*.

Identitas agama kandidat adalah modal awal dalam praktek politik identitas berbasis agama ini. Jika dirinci identitas agama kandidat dan kesesuaiannya dengan masyarakat DKI Jakarta, maka sebagai berikut ; Basuki T. Purnama beragama Kristen Protestan, jika berkaca pada data tahun 2016 jumlah umat Kristen Protestan di DKI Jakarta sebanyak 887.628 orang, yang merupakan umat beragama kedua mayoritas di DKI Jakarta. Sementara 3 kandidat lainnya, Djarot Syaiful Hidayat, Anies Rasyid Baswedan, dan Sandiaga S. Uno beragama Islam yang berdasarkan data tahun 2016 jumlah penduduk DKI Jakarta beragama Islam sebanyak 8.589.252 orang, atau 83 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Islam dan Kristen Protestan adalah 2 agama teratas dengan pengikut terbanyak di DKI Jakarta..

Politik identitas agama ini dapat dilihat dari program kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari umat beragama, dan sebagai bentuk keberpihakan pada identitas agama.

Tabel 10 Program Kebijakan Yang Ditawarkan Kandidat Putaran Kedua Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Pasangan Calon	Program Kebijakan yang Ditawarkan
Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberangkatkan umrah para pengurus masjid, imam masjid, marbot, guru mengaji, muadzin, serta para pengurus jenazah 2. Peningkatan kesejahteraan pengurus masjid, ustaz, guru mengaji, dan petugas jenazah
Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama. 2. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan majelis taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan 3. Melakukan perbaikan pelayanan tanah wakaf, pengembangan wirausaha Muslim, meningkatkan bantuan sosial untuk masjid dan majelis taklim.

Sumber Data : Pengolahan data dari berbagai media massa daring (beritasatu.com, 2020) (jawapos.com, 2020).

Berbagai program kebijakan ini bukan sekedar upaya untuk meraih dukungan umat beragama tertentu, tetapi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya para kandidat untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kesetaraan sosial berbasis agama yang merupakan salah aspek sosial.

Beberapa kegiatan atau perilaku politik yang ditunjukkan oleh para kandidat untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari organisasi berbasis agama, antara lain :

- a. 17 Januari 2017, Anies R. Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Ustad Fikri Haikal di Kramat Pela, Jakarta Selatan (Tempo.co, 2017).
- b. 13 Januari 2017, Anies R. Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taqwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan (Adriana Megawati, 2017).
- c. 07 Februari 2017 Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno berkunjung ke kantor Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta (Anisyah Al Faqir, 2017).
- d. 09 Januari 2017, Basuki T. Purnama mengunjungi Gus Nuril di Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, Rawamangun, Jakarta Timur (Delvira Hutabarat, 2017)
- e. 15 Januari 2017 Basuki T. Purnama menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh RelaNu (Relawan Nusantara) pimpinan Nusron Wahid (Ahmad Muawal Hasan, 2020)

Sementara dukungan dari berbagai organisasi masyarakat maupun relawan berlatar agama, antara lain :

- a. Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat : RelaNu (Relawan Nusantara), GP Ansor, dan Generasi Muda Muhammadiyah.
- b. Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno : Relawan Muhammadiyah, Alumni HMI, Ikhwanul Muballighin, Forum Ulama Habaib (Fuhab), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Komunitas Kristiani Interdenominasi Gereja di Jakarta, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) DKI Jakarta dan Jaringan Santri Indonesia (JSI).

Selain itu terdapat penggunaan julukan yang memiliki unsur agama untuk mengidentifikasi pendukung kandidat tertentu yang bersifat sarkasme antara lain :

- a. *Kaum Kafirun*, dan *Kaum Munafikun* : Julukan ini didasarkan pada penyebutan bagi perilaku dan nilai yang dipraktekkan manusia atau

kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya julukan ini ditujukan pada sekelompok pendukung salah satu kandidat pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

- b. *Bani Taplak*, dan *Bani Serbet* : Kata *bani* dalam julukan ini identik dengan berbagai penyebutan bagi kelompok tertentu dalam ajaran agama yang berasal dari Timur Tengah (Islam, Kristen, dan Yahudi). Sementara kata *taplak* dan *serbet* didasarkan pada penggunaan bentuk gambar dan warna pada pakaian yang dipakai oleh para pendukung kandidat pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Julukan-julukan sarkasme ini pada akhirnya dijadikan sebagai identitas pada pendukung kandidat tertentu pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Selain itu terdapat pula penggunaan simbol agama yang digunakan oleh para kandidat dan ormas pendukung dengan mengganti kata “masyarakat” dengan kata “Umat”. Penggantian kata tersebut bukan dalam kaitannya dengan julukan tetapi ditujukan pada keberpihakan kandidat tertentu pada umat beragama. Selain itu, penggunaan kata umat yang ditujukan pada masyarakat DKI Jakarta akibat berkembangnya kasus penistaan agama oleh Basuki T. Purnama, yang direspon dengan demonstrasi berjilid hingga menguatnya populisme agama di DKI Jakarta bahkan Indonesia (pada pemilu nasional 2019). Oleh karena itu julukan sarkasme yang berubah menjadi identitas pendukung dan penggantian kata identitas masyarakat menjadi umat, dapat dikategorikan sebagai Identitas Proyek (*Project Identity*) dalam putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Perilaku politik untuk mendapatkan simpati dari umat beragama Islam adalah yang paling sering dilakukan oleh para kandidat, selain dominasi ormas dan relawan yang berlatar agama Islam. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena dari total penduduk DKI Jakarta, yang beragama Islam menempati posisi mayoritas dengan jumlah 8.589.252 orang. Oleh karena itu pendekatan emosional dan psikologi untuk mendapatkan dukungan harus diupayakan oleh para kandidat. Program kebijakan yang berpihak pada umat beragama juga tidak bisa dihindarkan karena sebagai negara yang beragama, meski bukan negara teokrasi, kebijakan publik di bidang agama merupakan urusan wajib pemerintah. Meski dilihat dari keseluruhan program kebijakan para kandidat didominasi oleh keberpihakkannya kepada urusan agama atau umat beragama Islam karena alasan mayoritas. Padahal urusan kewajiban negara harusnya setara baik antara umat beragama mayoritas maupun minoritas. Meskipun begitu dapat dipahami hal ini dilakukan dalam upayanya mendapatkan dukungan pemilih.

Politik Identitas Ekonomi

Identitas ekonomi berupa profesi maupun tingkat kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Identitas Legitimasi (*Legitimizing Identity*) yang dibentuk oleh kandidat. Pengelompokan profesi pemilih dan tingkat kesejahteraan ini dilakukan melalui pembedaan program kebijakan yang ditawarkan, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah adanya dukungan oleh profesi dan struktur sosial ekonomi yang berbeda. Namun hal ini tidak semata hanya sebagai upaya untuk pencitraan namun sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah ekonomi dalam upaya menciptakan keadilan sosial, pemerataan pendapatan, maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai program dan kebijakan tersebut ditujukan secara langsung atau pada salah satu sektor ekonomi, yang berdampak pada identitas profesi tertentu.

Tabel 11 Kebijakan Yang Ditawarkan Kandidat Pada Putaran Kedua Pemilukada DKI Jakarta Berbasis Identitas Ekonomi

Kandidat	Program Kebijakan yang Ditawarkan
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2. Melanjutkan revitalisasi pasar 3. Melanjutkan program budidaya ikan 4. Membangun pasar perkulakan 5. Program pemberdayaan warga rusun
Anies R. Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu. 2. Membuka 200 ribu lapangan kerja. 3. Membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikannya dengan dunia usaha. 5. Mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan memperpendek alur distribusi barang. 6. Menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. 7. Merevitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang. 8. Menghentikan reklamasi teluk Jakarta. 9. Memberikan rumah hunian bagi masyarakat Jakarta dengan DP Rp 0. 10. Memperluas akses dan memperbaiki kualitas air bersih. 11. Membangun kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu dengan menyertakan pengembang kelas menengah.

Sumber Data : (Dhimas Ginanjar, 2017)

Dampak dari program kebijakan dalam upaya penyelesaian masalah ekonomi oleh para kandidat ini adalah lahirnya dukungan dari kelompok identitas kelas sosial tertentu, dan profesi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun ekonomi menjadi kewajiban pemerintah, namun penyebutan secara jelas identitas profesi maupun kelas sosial dalam program kebijakan yang ditawarkan, atau pada saat kampanye, merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan dari identitas ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Selain itu program kebijakan yang ditawarkan menysasar secara langsung pada kesamaan nasib masalah sosial sebagai bagian dari pembentukan Identitas Resisten (*Resistance Identity*). Identitas resisten yang terbentuk berdasarkan pengaruh dari sistem ekonomi adalah identitas kesamaan masalah sosial yang dialami, seperti korban penggusuran, dan korban reklamasi pulau di teluk Jakarta. pasangan Basuki – Djarot berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap warga korban penggusuran yang telah dipindahkan ke rumah susun. Sementara pasangan Anies – Sandi menawarkan kebijakan untuk menghentikan proyek reklamasi pulau yang telah menghilangkan sumber kehidupan masyarakat nelayan di teluk Jakarta.

Program kerja yang ditawarkan oleh para kandidat ini berdampak pada lahirnya dukungan dari berbagai ormas maupun relawan berlatar ekonomi seperti di bawah ini :

- a. Pasangan Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat: Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI), Komunitas Muda Mudi Berkarya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI).
- b. Pasangan Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno : Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Koalisi Buruh Jakarta (terdiri dari 14 organisasi buruh) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Berbagai kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat hakikatnya merupakan upaya wajib pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun dampak yang ditimbulkan akibat penyebutan identitas profesi dan struktur sosial ekonomi tertentu, akan berdampak pada keberpihakan pemilih dari kelompok identitas tersebut untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Oleh karena itu politik identitas ekonomi adalah sebuah kemustahilan untuk dihindarkan dalam pemilukada DKI Jakarta, jika kita berkaca pada beragamnya kondisi profesi, tingkat kesejahteraan, maupun ormas berbasis ekonomi yang ada di DKI Jakarta.

Politik Identitas Gender

Pengaruh gender dalam politik hakikatnya sudah sejak lama diterapkan dalam praktik politik bahkan menjadi bagian dari perilaku para politisi sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari gender yang menjadi mayoritas. Namun hal ini juga dilakukan sebagai bentuk keberpihakan para politisi kepada gender yang selalu mengalami diskriminasi secara sosial. Kedua kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada tingkat keterpilihan dan dukungan pada politisi yang menjadi kandidat dalam pemilu. Selayaknya yang terjadi dalam pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 politisasi identitas gender terwujud dalam bentuk program kebijakan maupun dukungan oleh ormas berdasarkan gender, antara lain :

Tabel 12 Program Kebijakan Berbasis Identitas Gender Pada Putaran Kedua Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2017

Pasangan Calon	Program Kebijakan yang Ditawarkan
Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan atas hak kesehatan reproduksi, seksualitas, dan mental 2. Layanan aborsi yang aman untuk korban kekerasan seksual 3. Pemberian pemahaman gender kepada petugas kesehatan 4. Mengurangi angka kematian ibu hingga 70 per 100.000 per angka kelahiran 5. Kebijakan pelarangan perkawinan anak di bawah 18 tahun untuk memastikan anak perempuan mendapatkan pendidikan berkualitas selama 12 tahun. 6. Memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswi dari keluarga miskin untuk menjadi dokter dan bidan. 7. Memastikan kuota minimal 30 % tetap terjaga guru dan tenaga ahli perempuan. 8. Memfasilitasi pendidikan <i>enterprenurship</i> dan akses terhadap modal bagi perempuan pengusaha kecil menengah 9. Menghapus kebijakan diskriminatif terhadap gender
Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses kredit kelompok usaha perempuan melalui Ban DKI 2. Program Kredit Usaha Perempuan Mandiri 3. Pengembangan kewirausahaan perempuan lulusan SD-SMP 4. Optimalisasi kinerja dan efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A). 5. Mendorong adanya fasilitas antar jemput malam untuk semua perempuan pekerja di pemerintahan maupun badan swasta 6. Melakukan rawat gabung bagi ibu yang baru melahirkan 7. Pendampingan dan konseling bagi ibu pengidap HIV 8. Penyediaan motor darurat persalinan di setiap puskesmas untuk mengantar ibu-ibu yang akan melahirkan namun tinggal di gang perkampungan. 9. Mendukung Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif. 10. Pendataan dan pemantauan dini ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus. 11. Memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak 12. Menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti ruang menyusui dan tempat penitipan anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga. 13. Memberikan kredit usaha perempuan mandiri. 14. Mengaktifkan 267 rumah aman, merevitalisasi unit reaksi cepat perlindungan perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual, pelecehan maupun penjualan manusia.

Sumber data : (Program Dua Kandidat Gubernur DKI Jakarta Soal Perempuan dan Anak, n.d.)

Sementara ormas pendukung berbasis gender yang menjadi pendukung maupun tim sukses dari kedua pasang kandidat ini antara lain ;

- a. Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat : Komunitas Muda Mudi Berkarya, Komunitas Juang Perempuan Jakarta Utara, Perempuan Peduli Kota Jakarta, dan Perempuan Untuk Pemenangan Basuki-Djarot (PMP BaDja).
- b. Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno : Bidadari Anies Sandi, dan Sayap Perempuan PKS.

Posisi identitas gender terutama perempuan dalam sistem sosial khususnya politik sangat vital. Perempuan berkaitan dengan penciptaan, pengembangan generasi penerus, dan ketahanan rumah tangga yang didalamnya terdapat diskusi mengenai pendidikan, kesehatan, sembako, dan keberlangsungan rumah tangga. Kesemua itu sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sehingga posisi perempuan hakikatnya setara dengan laki-laki dalam kaitan dengan kepentingannya dalam politik. Namun pada masyarakat dengan budaya timur yang kuat, perempuan selalu mengalami diskriminasi dalam pembagian kerja maupun sistem upah, bahkan dalam perhatiannya terhadap kebutuhan perempuan. Oleh karena posisinya yang sangat vital maka tidak heran jika para kandidat memiliki kecenderungan dalam politik identitas berdasarkan gender ini berfokus pada kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Politik Identitas Etnis, dan Politik Identitas lainnya

Politik identitas berlatar etnis, suku, atau ras adalah kondisi yang tidak dapat dihindarkan dalam praktek politik pada masyarakat yang memiliki keberagaman identitas seperti di DKI Jakarta. Identitas etnis merupakan kondisi alamiah yang dimiliki oleh semua orang. Ketimpangan jumlah sehingga tercipta jumlah manusia yang berasal dari etnis tertentu lebih banyak adalah juga kondisi alamiah. Oleh karena itu kedua alasan ini menjadi alasan kuat etnis dipakai dalam praktek pemilukada. Selain itu terdapat program kebijakan para kandidat yang berpihak pada etnis tertentu, meski didominasi upaya keberpihakan pada etnis yang mengalami praktek diskriminasi sosial atau masyarakat etnis pribumi di daerah.

Pasangan kandidat Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat dalam program kebijakan yang diajukan pada masa pemilukada 2017 tidak menyebutkan keberpihakkannya pada etnis tertentu. Meskipun begitu terdapat dukungan ormas atau relawan yang berlatar belakang etnis tertentu, antara lain ; Forum Pemuda NTT, Forum Masyarakat Sulawesi Utara, Paguyuban Arek Jawa Timur, Warga Suku Dayak Jakarta, Paguyuban Batak, Paguyuban Papua, Komunitas Sunda Keur Ahok, Forum Masyarakat Sunda Se-Nusantara, Manggala Garuda Putih Gapura Seni Dan Budaya Sunda, dan Front Betawi Bersatu. Berbagai dukungan dari kalangan masyarakat berbagai etnis ini adalah masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta. Keberadaan mereka dikarenakan faktor urbanisasi.

Sementara pasangan kandidat Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno dalam program kerja yang ditawarkan dan dipengaruhi identitas etnis antara lain :

- a. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri dengan menyediakan
- b. Membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan di jajaran Kepulauan Seribu
- c. Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat inovasi konservasi ekologi.
- d. Membangun Taman Benyamin Sueb dan Museum Kebudayaan Betawi sebagai pusat perawatan dan pengembangan kebudayaan Betawi (Dhimas Ginanjar, 2017).

Fokus kebijakan pada penduduk Kepulauan Seribu dianggap sebagai bagian dari identitas etnis karena mayoritas penduduk Kepulauan Seribu adalah masyarakat dari wilayah lain di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan wilayah Indonesia lainnya. Sementara etnis Betawi adalah etnis kedua mayoritas di DKI Jakarta yang dianggap sebagai etnis “tuan rumah”.

Selanjutnya ormas dan relawan berlatar belakang etnis yang menyatakan dukungan kepada pasangan kandidat ini yaitu ; Forum Masyarakat Sulawesi Utara Dan Gorontalo, Komunitas Jawara Betawi, Laskar Betawi, Ikatan Keluarga Besar Betawi (IKBB), Paguyuban Kuningan, Paguyuban Madura, Paguyuban Minang, Forum Batak Marbisuk, Masyarakat Aceh Serantau, dan Kelompok Masyarakat Maluku Dan Papua Di Jakarta Utara (data dirangkum dari berbagai media massa). Dukungan dari berbagai etnis kepada para kandidat ini didasarkan pada faktor kedekatan emosional, psikologi, kesamaan etnis dengan kandidat, maupun faktor pilihan rasional.

Identitas etnis para kandidat juga berpengaruh terhadap dukungan dari etnis yang sama, oleh karena itu komposisi identitas etnis para kandidat sebagai berikut :

- a. Basuki T. Purnama beretnis Tionghoa : Jumlah etnis Tionghoa di DKI Jakarta berdasarkan hasil sensus tahun 2010 mencapai 632 ribu jiwa. 6,1 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta.
- b. Djarot S. Hidayat beretnis Jawa : Jumlah penduduk beretnis Jawa di DKI Jakarta sejumlah 3.453.000 jiwa, 33,5 % dari total penduduk.
- c. Anies R. Baswedan beretnis Arab : meski tidak memiliki data pasti tentang jumlahnya di DKI Jakarta secara keseluruhan jumlahnya di Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2010 sebanyak 162.772 atau 0,07 % di seluruh Indonesia, secara di khusus DKI Jakarta penyebarannya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
- d. Sandiaga S. Uno beretnis Gorontalo : Jumlah etnis Gorontalo tidak lebih dari 32 ribu jiwa, atau 0,3 % di seluruh DKI Jakarta.

Identitas etnis kandidat dalam praktek pemilu selalu dilakukan melalui proses identifikasi diri kandidat dengan para pemilih, maupun sebaliknya. Dorongan etnosentrisme dan faktor kebanggaan akan menjadi pemicu pemilih untuk mendukung atau memilih kandidat yang memiliki etnis yang sama.

Selain politik identitas agama, ekonomi, gender, dan etnis, terdapat pula politisasi identitas lainnya yang dapat dikategorikan sebagai identitas resisten pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Politisasi identitas itu tercipta akibat pemilu presiden tahun 2014, yaitu partai politik koalisi pendukung kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2014 adalah juga partai politik yang menjadi pendukung kedua kandidat. Kondisi berlawanan pada tahun 2014 ini terulang pada pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, sehingga identitas pendukung pada pilpres kala itu diwujudkan kembali dalam pemilukada DKI Jakarta. Bahkan isu politik yang mewarnai pemilu 2014 terulang pada pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 ini.

Terdapat pula pembentukan identitas proyek pada putaran kedua pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 ini, yaitu ; *pertama*, politisasi identitas pemilih rasional dan emosional. Identitas ini terbentuk akibat gelombang demonstrasi masyarakat Indonesia yang menganggap Basuki T. Purnama telah menodai agama Islam dengan mengutip salah satu ayat di dalam Al Quran. Demonstrasi ini menyerukan untuk tidak boleh memilih penista agama sebagai seorang pemimpin, apalagi memiliki kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu kelompok ini disebut sebagai kelompok pemilih emosional. Sementara pemilih yang memilih karena didasarkan pada alasan untung rugi, prestasi kerja, serta *track record* sebagai pejabat publik dikategorikan sebagai pemilih rasional. *Kedua*, Masyarakat Pancasila dan Anti Pancasila: identitas ini terbentuk akibat polarisasi perilaku pemilih rasional dan emosional. Perilaku pemilih emosional dianggap tidak menghargai pluralisme, dan hal itu dinilai sebagai perilaku yang

bertentangan dengan ideologi Pancasila. Terintegrasinya masyarakat ke dalam berbagai kelompok identitas di atas disebabkan oleh adanya identifikasi diri oleh para kandidat kepala daerah ke dalam kelompok identitas tersebut, dan atau adanya kesamaan kepentingan oleh berbagai kelompok identitas dengan visi misi dan program yang diusung oleh kandidat kepala daerah.

Kesimpulan

Identitas sebagai ciri yang dimiliki oleh setiap manusia telah menjadi salah satu landasan utama dalam interaksi sosial. Manusia memiliki berbagai macam identitas yang dimiliki secara alami maupun terkonstruksi dalam interaksi sosial. Identitas alami tidak dapat diubah maupun berubah seperti ras, suku, maupun identitas lain yang dibawa sejak lahir. Namun terdapat identitas yang bisa berubah maupun diubah yang merupakan identitas yang terlahir dari interaksi sosial maupun identitas yang dipilih untuk dimiliki oleh setiap manusia, seperti identitas agama, keanggotaan organisasi atau kelompok sosial, tempat tinggal, kesamaan pengalaman sosial dan identitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan kebutuhan atau kepentingan politik. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta identitas alamiah seperti etnis, dan gender, maupun identitas yang terbentuk dalam interaksi sosial seperti agama, ekonomi, perilaku pemilih, julukan sarkasme, maupun penamaan pada kelompok masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila, telah berubah menjadi komoditas politik oleh para kandidat dan ormas atau relawan pendukung. Namun harus diakui bahwa berbagai identitas tersebut memiliki kepentingan politik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Sehingga kenyataan bahwa demokrasi prosedural adalah ajang *identity struggle* yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun.

Berbagai bentuk polarisasi identitas dalam putaran kedua pilkada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 diatas sesuai dengan yang dikatakan oleh Castells yaitu ; sebagai upaya artikulasi dan agregasi kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik, penguasaan atas distribusi nilai, pembuatan kebijakan berdasarkan nilai-nilai identitas, hingga perebutan kekuasaan. Politik identitas merupakan keniscayaan yang tidak dapat terhindarkan dalam pilkada sebagai praktek legal perebutan kekuasaan, sebab aktor politik akan berupaya membentuk dan menggandakan jejaring identitas sosial sehingga mampu meraih suara mayoritas. Selain itu dilakukan pula upaya mengagregasikan kepentingan dan kebutuhan identitas tersebut dalam bentuk program kebijakan. Tidak terlepas pula upaya para kandidat maupun pemilih untuk menyamakan identitas yang dimiliki.

References

- A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control (Terj)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Adriana Megawati. (2017, November 19). *beritajakarta.id*. Diambil kembali dari [beritajakarta.id](http://www.beritajakarta.id/read/52036/anies-hadiri-peringatan-maulid-nabi-di-masjid-attaqwa-attahiriyah#.XrLYOagzBIU): <http://www.beritajakarta.id/read/52036/anies-hadiri-peringatan-maulid-nabi-di-masjid-attaqwa-attahiriyah#.XrLYOagzBIU>
- Agus Lukman. (2017, Januari 3). *Setelah Anies Temui FPI, Berikutnya Giliran FBR dan Ormas Pendukung Demokrat*. Diambil kembali dari www.kbr.id: https://kbr.id/nasional/01-2017/setelah_anies_temui_fpi_berikutnya_giliran_fbr_dan_ormas_pendukung_demokrat/87920.html

- Ahmad Muawal Hasan. (2020, maret 16). *tirto.id*. Diambil kembali dari *tirto.id*:
<https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>
- Alfian Risfil. (2017, Februari 2). *Keluarga Besar Betawi Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.teropongsenayan.com: <http://www.teropongsenayan.com/56902-keluarga-besar-betawi-dukung-anies-sandi>
- Alfian Risfil Auton. (2017, Maret 13). *Jaringan Santri Indonesia: Kami Dukung Anies-Sandi karena Aqidah*. Diambil kembali dari www.teropongsenayan.com:
<http://www.teropongsenayan.com/59393-jaringan-santri-indonesia-kami-dukung-anies-sandi-karena-aqidah>
- Angga Wijaya. (2017, Maret 27). *Masyarakat Papua di Jakarta 1000 Persen Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari porosjakarta.com: <http://porosjakarta.com/12491/masyarakat-papua-di-jakarta-1000-persen-dukung-ahok-djarot>
- Angga Yudha Pratomo. (2016, Oktober 15). *Dianggap membumi, warga Sulut domisili di Jakarta dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/peristiwa/dianggap-membumi-warga-sulut-domisili-di-jakarta-dukung-ahok-djarot.html>
- Anisyah Al Faqir. (2017, Februari 6). *merdeka.com*. Diambil kembali dari [merdeka.com](http://www.merdeka.com):
<https://www.merdeka.com/politik/muhammadiyah-dki-anies-sandi-merupakan-keluarga-besar.html>
- Aqila Zafira. (2016, November 8). *Generasi Muda Muhammadiyah Dukung Ahok – Djarot*. Diambil kembali dari porosjakarta.com: <http://porosjakarta.com/7856/generasi-muda-muhammadiyah-dukung-ahok-djarot>
- Arief Ikhsanudin. (2017, April 2). *Gerakan Pemuda Islam Indonesia DKI Jakarta Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3462828/gerakan-pemuda-islam-indonesia-dki-jakarta-dukung-anies-sandi>
- Asni Ovier. (2017, April 14). *RelaNU Rapatkan Barisan Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/425201-relanu-rapatkan-barisan-dukung-ahokdjarot>
- Audrey Santoso. (2017, April 15). *Didukung Masyarakat Indonesia Timur, Anies Menari Cakalele*. Diambil kembali dari [detik.com](http://www.detik.com): <https://news.detik.com/berita/d-3475282/didukung-masyarakat-indonesia-timur-anies-menari-cakalele>
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov DKI Jakarta. (2019, January 2). *data.jakarta.go.id*. Diambil kembali dari data.jakarta.go.id: <http://data.jakarta.go.id/dataset/data-organisasi-masyarakat-yang-terdaftar-di-dki-jakarta-tahun-2018/resource/1a17f12c-dcb3-438c-ab2a-76566c0d52bf>
- Barker, C. (2005). *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bartanius Dony. (2017, April 1). *Organisasi Buruh Jakarta Dukung Anies Sandi*. Diambil kembali dari [detik.com](http://www.detik.com): <https://news.detik.com/berita/d-3462402/13-organisasi-buruh-jakarta-dukung-anies-sandi>

- beritasatu.com. (2020, April 20). *beritasatu.com*. Diambil kembali dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/422722/banyak-program-ahokdjarot-yang-memihak-umat-islam-jakarta>
- Bisnis.com. (2016, Desember 19). *Hari Ini, Bidadari Anies-Sandi Deklarasi*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://jakarta.bisnis.com/read/20161219/77/613166/hari-ini-bidadari-anies-sandi-deklarasi>
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta : Sejarah 400 Tahun*. (G. Triwira, Penyunt.) Depok: Masup Jakarta.
- BPS DKI Jakarta. (2017). *Jakarta Dalam Angka*. 52: BPS DKI Jakarta.
- BPS DKI Jakarta. (2018). *Jakarta Dalam Angka*. DKI Jakarta: BPD DKI Jakarta.
- BPS DKI Jakarta Dalam Angka 2017. (2017). *Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kelurahan*. Diambil kembali dari jakarta.go.id: <https://data.jakarta.go.id/my/dataset/jumlah-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-agama/resource/96af31cc-633b-4a86-a0cd-17ed6e90af57>
- BPS Sensus Penduduk 2010. (t.thn.). *Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut*. Diambil kembali dari sp2010.bps.go.id: <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=3100000000>
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Candiwidoro, R. R. (Januari 2017). Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 No 1, 65.
- Carlos Roy Fajarta. (2017, Maret 21). *Relawan Muhammadiyah Komitmen Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/420792-relawan-muhammadiyah-komitmen-dukung-anies-sandi>
- Castell, L. (2007). *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Masup Jakarta.
- Castells, M. (2010). *The Power Of Identity*. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.
- Chusnul Chotimah. (2017, April 7). *GP Ansor Mengklaim Dukung Ahok Demi NKRI dan Kebhinekaan*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/gp-ansor-mengklaim-dukung-ahok-demi-nkri-dan-kebhinekaan-cmkd>
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah. (C. D. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah, Penerj.) Jakarta: KIK Press.
- Delvira Hutabarat. (2017, January 9). *liputan6.com*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2821724/sambang-pes-soko-tunggal-ahok-dapat-dukungan-gus-nuril>
- Dhimas Ginanjar. (2017, April 20). *jawapos.com*. Diambil kembali dari jawapos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/04/2017/catat-ini-daftar-janji-anies-sandi-saat-kampanye-yang-harus-dipenuhi/>

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, P. (2017). *Data Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin*. DKI Jakarta: <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-berdasarkan-kelompok-usia-per-kelurahan>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. (2019, Oktober 4). Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kelurahan. DKI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan - Badan Pusat Statistik. (2016). *Survei Angkatan Kerja Nasional 2016 Agustus*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fajarta, Carlos Roy. (2017, April 6). *Serikat Buruh Pelabuhan Tanjung Priok Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/423657/serikat-buruh-pelabuhan-tanjung-priok-dukung-ahokdjarot>
- Fauzan Hilal. (2016, Agustus 28). *Terbukti Bangun Jakarta, Komunitas Juang Perempuan Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.medcom.id: <https://www.medcom.id/nasional/metro/Obz92BdN-terbukti-bangun-jakarta-komunitas-juang-perempuan-dukung-ahok-djarot>
- Gutman, L. (2003). *Identity In Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- HA. (2016, Desember 15). *500 Aktivistis Perempuan Beri Dukungan ke Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/404782/500-aktivis-perempuan-beri-dukungan-ke-ahokdjarot>
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Heller, A. d. (1995). *Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements : A New Handbook of Political Societies*. Oxford: Blackwell.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Hidayat, Reja. (2017, Februari 13). *Ribuan Relawan Siap Jaga TPS demi Kemenangan Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/ribuan-relawan-siap-jaga-tps-demi-kemenangan-ahok-djarot-ciWd>
- Ibnu Siena. (2017, Maret 23). *Dukung Anies-Sandi, Parmusi targetkan menang mutlak*. Diambil kembali dari www.merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jakarta/dukung-anies-sandi-parmusi-targetkan-menang-mutlak.html>
- Irwandi Arsyad. (2017, Maret 8). *Warga Madura di Jakarta Deklarasi Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/metro/891579-warga-madura-di-jakarta-deklarasi-dukung-anies-sandi>

- jawapos.com. (2020, April 21). *jawapos.com*. Diambil kembali dari jawapos.com:
<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/04/2017/catat-ini-daftar-janji-anies-sandi-saat-kampanye-yang-harus-dipenuhi/>
- Katadata.co.id. (2018, January 24). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>. Diambil kembali dari katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>
- katadata.co.id. (2018, January 24). *katadata.co.id*. Diambil kembali dari katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>
- Komisi Pemilihan Umum. (2020, April 20). *kpu.go.id* . Diambil kembali dari kpu.go.id:
<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/DKI%20JAKARTA>
- Kompas.com. (2017, November 23). Anggaran Dana Hibah DKI 2018 Rp 1,7 Triliun, APBD 2016 Rp 2,5 Triliun. (A. S. Syatiri, Penyunt.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Diambil kembali dari
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/23/11260251/anggaran-dana-hibah-dki-2018-rp-17-triliun-apbd-2016-rp-25-triliun>
- kompas.com. (2017, March 2). Jutaan yang Tinggal di Jakarta sebanyak 27.100 orang. (H. B. Alexander, Ed.) Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Retrieved from
<https://properti.kompas.com/read/2017/03/02/200000621/jutawan.yang.tinggal.di.jakarta.sebanyak.27.100.orang>
- kpujakarta.go.id. (2017, April 30). KPU DKI Tetapkan Hasil Rekap Perolehan Suara Putaran Kedua. DKI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Diambil kembali dari
www.kpujakarta.go.id+hasil+pilkadaPilkada+jakarta+2017&oq=www.kpujakarta.go.id+hasil+pilkadaPilkada+jakarta+2017&gs_l=psy-ab.3...16771.18548..18705...0.2..0.164.1373.4j8.....0....1..gws-wiz.....0i71..26%3A133.ik_8hoIjWUY&ved=0ahUKEwilw7PvgqPoAhXRTX0KHW
- Kristianus. (2009). *isah Penting Dari Kampung Orang Dayak dan Madura di Sebangki*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- LB Ciputri Hutabarat. (2016, November 28). *Suku Dayak DKI Beri Kopiah & Selendang ke Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.medcom.id: <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/nbweQ0mK-suku-dayak-dki-beri-kopiah-selendang-ke-ahok-djarot>
- Lenny Tristia Tambun. (2017, Maret 23). *Paguyuban Arek Jawa Timur Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com:
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/421108/paguyuban-arek-jawa-timur-dukung-ahokdjarot>
- Lis Yuliani. (2017, Maret 09). *Dukung Anies-Sandi, Relawan Kesehatan Beri Kontrak Politik*. Diambil kembali dari www.viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/metro/892074-dukung-anies-sandi-relawan-kesehatan-beri-kontrak-politik>
- M. Ahsan Ridhoi. (2017, Februari 23). *Forum Ulama dan Habib DKI Jakarta Dukung Penuh Anies Sandi*. Diambil kembali dari www.tirto.id: <https://tirto.id/forum-ulama-dan-habib-dki-jakarta-dukung-penuh-anies-sandi-cjAT>

- medium.com. (2017, Maret 15). *Mengapa Orang Batak Cenderung Dukung Ahok Berikut Penjelasannya*. Diambil kembali dari medium.com: <https://medium.com/@seputarmedan/mengapa-orang-batak-cenderung-dukung-ahok-berikut-penjelasannya-32a24a16a3fa>
- Mulyana, D. (2004). *etodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Azizah. (2016, November 22). *Dukungan Bertambah, Djarot Optimistis Menang*. Diambil kembali dari www.medcom.id: <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/5b27VOnk-dukungan-bertambah-djarot-optimistis-menang>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (September 2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Laporan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan*. DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pide, M. (2000, Agustus). Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. *Jurnal Hukum*, 7(No.14), 135-148.
- Pinter Politik. (2017, Oktober 26). *Komposisi Suku Bangsa DKI Jakarta*. Diambil kembali dari www.pinterpolitik.com: <https://www.pinterpolitik.com/komposisi-suku-bangsa-dki-jakarta/>
- Program Dua Kandidat Gubernur DKI Jakarta Soal Perempuan dan Anak*. (t.thn.). Diambil kembali dari id.theasianparent.com: <https://id.theasianparent.com/program-dua-kandidat-gubernur-dki-jakarta-soal-perempuan-dan-anak/>
- Pujosuwarno, S. (1992). *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Putra, P. M. (2016, November 20). *Forum Pemuda NTT Dukung Ahok-Djarot di Pilkada DKI*. Diambil kembali dari www.liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2662317/forum-pemuda-ntt-dukung-ahok-djarot-di-pilkada-dki>
- Rahmatulloh. (Juli 2021). Dinamika Kependudukan Di Ibukota Jakarta (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas Dan Kesejahteraan Penduduk Di DKI Jakarta). *GENTA MULIA*, VIII(No.2), 59.
- Rayful Mudassir. (2017, April 8). *Giliran Relawan Masyarakat Aceh Serantau Dukung Anies-Sandi di Pilkada DKI*. Diambil kembali dari okezone.com: <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/04/08/338/1662372/giliran-relawan-masyarakat-aceh-serantau-dukung-anies-sandi-di-pilkada-dki>
- Rina Atriana. (2016, November 18). *Dukung Ahok, Front Betawi Bersatu: Jangan Takut, Pak!* Diambil kembali dari detik.com: <http://news.detik.com/berita/3348338/dukung-ahok-front-betawi-bersatu-jangan-takut-pak>
- rmoljakarta.com. (2017, Maret 1). *Warga Sultra Di Jakarta Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.rmoljakarta.com: <https://www.rmoljakarta.com/read/2017/03/01/43459/Warga-Sultra-Di-Jakarta-Dukung-Anies-Sandi->
- Setyaningrum, A. (2005). Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial Dalam Politik Perlawanan. *Mandatory*, 2(2 : Politik Perlawanan), 13-34.

- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Snyder, J. (2003). *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Subianto, B. (2009). Ethnic Politics and the Rise of the Dayak Bureaucrats in Local Election. *ISEAS*, 355.
- Taufik Fajar. (2016, Maret 26). *Anies-Sandi Dapat Dukungan dari Paguyuban Kuningan Jabar*. Diambil kembali dari okezone.com: <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/03/26/338/1651548/anies-sandi-dapat-dukungan-dari-paguyuban-kuningan-jabar>
- Teguh Firmansyah. (2017, April 11). *Komunitas Gereja Ini Deklarasi Dukung Anies-Sandiaga*. Diambil kembali dari www.republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/04/11/oo8tsw377-komunitas-gereja-ini-deklarasi-dukung-aniessandiaga>
- Tempo.co. (2017, April 14). *Ini Alasan Komunitas Sunda Dukung Ahok Djarot*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.co/read/865918/ini-alasan-komunitas-sunda-dukung-ahok-djarot>
- Tempo.co. (2017, Januari 17). *polkada.tempo.co*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.co/read/837031/ceramah-anies-di-maulid-nabi-afdal-mana-1-sama-3-rakaat>
- Tim Viva. (2017, April 2). *Komunitas Jawara Betawi Deklarasi Dukung Anies-Sandi*. Diambil kembali dari www.viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/metro/900682-komunitas-jawara-betawi-deklarasi-dukung-anies-sandi>
- tirto.id. (2019, February 28). *DKI Jakarta Bukan Provinsi dengan Ketimpangan Terparah, Pak Anies*. (H. Abdulsallam, Penyunt.) *DKI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*. Diambil kembali dari <https://tirto.id/dki-jakarta-bukan-provinsi-dengan-ketimpangan-terparah-pak-anies-dhVh>
- Tumanggor, Fetra. (2017, April 15). *Organisasi Buruh Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari tagar.id: <https://www.tagar.id/organisasi-buruh-dukung-ahok-djarot/>
- Widayanti, T. (2009). *Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria*. (U. Palindungan, Penyunt.) Yogyakarta: Research Center For Politics and Government (PolGov).
- Wil. (2017, Maret 27). *Laskar Betawi Deklarasi Dukung Anies - Sandi*. Diambil kembali dari okezone.com: <https://news.okezone.com/play/2017/03/27/1/92792/laskar-betawi-deklarasi-dukung-anies-sandi>
- Yeremia Sukoyo. (2017, April 11). *Komunitas Masyarakat Sunda DKI Dukung Ahok-Djarot*. Diambil kembali dari www.beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/megapolitan/424551/komunitas-masyarakat-sunda-dki-dukung-ahokdjarot>